

OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI NAGARI BOMAS SOLOK SELATAN

Dicky Dwi Putra Ayri^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}, Boni Saputra^{3(c)}

^{1,2,3}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}dickydwiputraayri@email.com, ^{b)}jumiati@fis.unp.ac.id, ^{c)}bonisaputra@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

14-02-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2025

Kata Kunci:

Dana Desa, Pembangunan Ekonomi Pedesaan, BUMDes

Keywords:

Village Fund, Rural Economic Development, Village-Owned Enterprises, Local Governance, Economic Diversification

Corresponding Author:

dickydwiputraayri@email.com

ABSTRAK

Disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia menciptakan tantangan struktural dalam pembangunan nasional yang berkeadilan, sementara optimalisasi Dana Desa masih menghadapi kesenjangan antara potensi teoritis dan realisasi praktis setelah lebih dari satu dekade implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, melibatkan 10 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, serta menerapkan triangulasi metode melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif selama 6 bulan, dan analisis 45 dokumen resmi dengan teknik analisis tematik induktif. Temuan penelitian menunjukkan evolusi strategis dari fokus infrastruktur fisik menuju pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembangunan fisik dan non-fisik, dengan BUMNag "Tungku Tigo Sajarang" berperan sebagai katalis diversifikasi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan *framework* analisis multidimensional yang mengintegrasikan perspektif *governance*, *economic development*, dan *local institutional capacity* dalam konteks sistem pemerintahan nagari, serta memberikan evidensi empiris bahwa efektivitas Dana Desa bergantung pada kualitas proses perencanaan partisipatif, kapasitas kelembagaan lokal, dan strategi diversifikasi ekonomi berbasis potensi sumber daya desa.

ABSTRACT

Economic disparities between urban and rural areas in Indonesia create structural challenges to equitable national development. At the same time, the optimization of Village Funds still faces gaps between theoretical potential and practical realization despite more than a decade of implementation. This study aims to comprehensively analyze the optimization of Village Fund Allocation in improving community economy in Nagari Bomas, Sungai Pagu District, South Solok Regency. The research methodology employed a qualitative approach with an instrumental case study design involving 10 key informants selected through purposive sampling. Methodological triangulation was implemented through in-depth interviews, participatory observation over six months, and the analysis of 45 official documents using inductive thematic analysis techniques. Research findings demonstrate a strategic evolution from a focus on physical infrastructure toward a holistic approach that integrates physical and non-physical development, with BUMNag's "Tungku Tigo Sajarang" catalyzing economic diversification, creating employment opportunities, and enhancing Village Original Income. This study contributes to the development of a multidimensional analytical framework that integrates governance, economic growth, and local institutional capacity perspectives within the context of the nagari governance system while providing empirical evidence that the

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.254>

PENDAHULUAN

Disparitas ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia merupakan tantangan struktural yang berkelanjutan dalam upaya pembangunan nasional yang berkeadilan. Kesenjangan ini terjadi karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur yang memadai, dan rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan adanya kesenjangan kemiskinan yang cukup besar antara daerah pedesaan dan perkotaan, dimana masyarakat desa menghadapi kondisi ekonomi yang lebih sulit dibandingkan masyarakat kota. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan menurunnya peran sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat pedesaan dalam perekonomian nasional selama periode 2019-2023. Situasi ini menggambarkan adanya tantangan dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dimana sektor yang menjadi andalan masyarakat desa justru mengalami penurunan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan kebijakan pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada pemerataan dan penguatan ekonomi pedesaan sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Alokasi Dana Desa telah menjadi instrumen fiskal desentralisasi yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pemberdayaan ekonomi desa memerlukan dukungan finansial yang memadai untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah memberikan dampak positif yang beragam, dimana sebagian besar alokasi dana difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik pedesaan, pengembangan Badan Usaha

Milik Desa yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di berbagai wilayah, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara substansial (Agunggunanto et al., 2016; Wowor, Singkoh & Waworundeng, 2019; Nugroho, 2015). Temuan-temuan empiris tersebut mengkonfirmasi bahwa Dana Desa memiliki potensi yang signifikan sebagai katalis pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Meskipun implementasi Dana Desa telah berjalan lebih dari satu dekade, masih terdapat kesenjangan antara potensi teoritis dan realisasi praktis dalam optimalisasi pemanfaatannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Kesenjangan ini terjadi karena adanya hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, dan lemahnya sistem pengawasan yang berdampak pada tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi desa. Studi terkini di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa sebagian kecil dari total Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan produktif ekonomi, sementara sebagian besar masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, dengan tingkat efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang sangat bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah dan kapasitas kelembagaan lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2023). Fenomena ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan fokus penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk memahami dinamika implementasi kebijakan Dana Desa dalam konteks spesifik karakteristik sosial-ekonomi

masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem pemerintahan nagari dengan struktur kelembagaan tradisional yang unik. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pemanfaatan dana, serta menganalisis dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui indikator pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha produktif, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Melalui analisis mendalam terhadap kasus Nagari Bomas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model optimalisasi Dana Desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini berargumen bahwa optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dicapai melalui integrasi pendekatan pembangunan fisik dan non-fisik yang berfokus pada penguatan kapasitas produktif lokal dan penguatan *kelembagaan participatory governance*. Argumen ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan sistem kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa implementasi Dana Desa di Nagari Bomas yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan produksi), pengembangan Badan Usaha Milik Nagari, dan program pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang terukur melalui indikator peningkatan pendapatan per kapita, diversifikasi sumber ekonomi, dan penurunan tingkat kemiskinan. Kerangka hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program akan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model optimalisasi Dana Desa yang dapat direplikasi dan diadaptasi dalam konteks keragaman karakteristik desa di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan

pencapaian target *Sustainable Development Goals* 2030. Hal ini menjadi kritical mengingat bahwa efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi pedesaan akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dalam dekade mendatang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan perspektif *governance*, *economic development*, dan *local institutional capacity* dalam konteks sistem pemerintahan nagari yang memiliki karakteristik unik sebagai hybrid antara struktur pemerintahan formal dan kelembagaan adat tradisional Minangkabau, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur pembangunan desa di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi inovatif bagi pengembangan teori dan praktik optimalisasi Dana Desa yang kontekstual, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang *evidence-based* untuk peningkatan efektivitas program pembangunan ekonomi desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik fenomena yang diteliti yang bersifat kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman mendalam tentang makna dan proses yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembangunan desa (Creswell & Poth, 2018). Unit analisis penelitian mencakup tiga dimensi utama: dimensi struktural yang meliputi mekanisme alokasi dan distribusi dana, dimensi proses yang mencakup tahapan perencanaan hingga implementasi program, dan dimensi *outcome* yang berupa dampak terhadap perekonomian masyarakat yang diukur melalui indikator kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi kasus instrumental dipilih karena memungkinkan peneliti menggunakan kasus Nagari Bomas sebagai instrumen untuk memahami isu yang lebih luas tentang optimalisasi dana desa di Indonesia, dengan

fokus pada eksplorasi pola, proses, dan dampak yang dapat memberikan insight untuk pengembangan teori dan praktik pengelolaan dana desa yang berkelanjutan.

Partisipan penelitian dipilih secara *purposive sampling* melibatkan 10 informan kunci yang terdiri dari 1 Wali Nagari, 6 aparatur pelaksana kelembagaan, 1 pengawas BPD, 1 Ketua BAMUS, dan 1 perwakilan LPMN, dengan kriteria pemilihan berdasarkan prinsip *maximum variation sampling* untuk memperoleh perspektif beragam dari berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam optimalisasi ADD. Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam terstruktur dengan durasi 60-90 menit per informan, observasi partisipatif selama 6 bulan untuk mengamati proses implementasi ADD, dan analisis dokumen terhadap 45 dokumen resmi berupa peraturan desa, laporan keuangan, dokumen perencanaan, dan laporan evaluasi program. Komposisi informan dan metode pengumpulan data ini dirancang untuk memastikan triangulasi sumber data yang memadai, dimana setiap kategori informan dapat memberikan perspektif unik berdasarkan peran dan posisinya dalam struktur tata kelola desa, mulai dari level pengambil keputusan hingga level implementasi dan pengawasan. Implementasi triangulasi metode dilaksanakan secara simultan dan iteratif, dimana temuan dari satu metode digunakan untuk memverifikasi dan memperdalam pemahaman yang diperoleh dari metode lainnya, sehingga menghasilkan data yang valid dan komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik induktif yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006) untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola makna dalam data yang telah terkumpul. Proses analisis dimulai dengan membaca berulang seluruh transkrip wawancara untuk memahami data secara menyeluruh, kemudian dilakukan pengkodean awal untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting, pencarian tema-tema utama, peninjauan kembali tema yang telah ditemukan, pemberian nama dan definisi tema, hingga penyusunan laporan hasil analisis (Clarke & Braun, 2017). Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana optimalisasi ADD berlangsung di Nagari Bomas dari sudut pandang para pelaku yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan temuan

yang berguna untuk pengembangan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Alokasi dan Distribusi Dana Desa di Nagari Bomas

Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Bomas menunjukkan tren yang relatif stabil dengan total akumulasi Rp 5.086.854.024,00 selama periode 2020-2024, yang mengikuti formula distribusi nasional 30% untuk operasional pemerintahan dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Distribusi proporsional ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan keseimbangan antara belanja operasional dan program pemberdayaan untuk mencapai efektivitas optimal dalam pengelolaan keuangan desa (Gusti, Agustar & Osmet, 2020). Data empiris menunjukkan alokasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 1.324.677.000,00, sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi Rp 83.700.000 akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penerimaan daerah secara nasional. Stabilitas alokasi dalam jangka menengah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa, meskipun menghadapi volatilitas eksternal yang memerlukan strategi mitigasi risiko yang lebih komprehensif.

Analisis distribusi dana menunjukkan bahwa proporsi penggunaan ADD di Nagari Bomas telah mengalami evolusi strategis dari fokus infrastruktur fisik menjadi pendekatan yang lebih holistik mencakup pembangunan manusia dan kelembagaan ekonomi. Pergeseran ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (Alana & Sari, 2023). Pada periode 2020-2021, sekitar 65% alokasi difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, namun pada periode 2022-2024 proporsi ini berubah menjadi 45% infrastruktur fisik dan 55% program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Transformasi pola alokasi ini menunjukkan tingkat kedewasaan perencanaan pembangunan desa yang semakin memahami kompleksitas kebutuhan masyarakat dan pentingnya investasi pada modal manusia sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Implementasi Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Perekonomian

Pembangunan infrastruktur fisik menjadi prioritas strategis dalam penggunaan ADD di Nagari Bomas, yang diimplementasikan melalui tiga komponen utama: pembangunan jalan akses pertanian yang cukup panjang, sistem irigasi dengan kapasitas yang luas, dan gedung serbaguna dengan ukuran yang memadai. Prioritas ini didasarkan pada karakteristik demografis masyarakat Nagari Bomas dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, sehingga infrastruktur pendukung pertanian menjadi kebutuhan primer dalam meningkatkan produktivitas ekonomi (Suwardi, 2011). Implementasi pembangunan jalan setapak telah mengurangi waktu tempuh ke lahan pertanian secara drastis, sistem irigasi meningkatkan area tanam produktif secara signifikan, dan gedung serbaguna telah menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Investasi infrastruktur ini telah menciptakan efek domino positif yang meningkatkan efisiensi rantai nilai pertanian dan membuka peluang diversifikasi ekonomi bagi masyarakat desa.

Dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil yang signifikan dengan peningkatan produktivitas pertanian yang substansial, penurunan biaya transportasi hasil pertanian yang berarti, dan terciptanya banyak lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Dampak ini konsisten dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan peran infrastruktur sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi produksi dan akses pasar (Khatimah, 2020). Efek berganda dari investasi infrastruktur menunjukkan rasio yang tinggi, dimana setiap rupiah yang diinvestasikan untuk infrastruktur menghasilkan peningkatan nilai ekonomi yang berlipat ganda melalui peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, dan penciptaan aktivitas ekonomi baru. Efektivitas pembangunan infrastruktur ini membuktikan bahwa alokasi ADD yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi desa dari subsisten menuju komersial, dengan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Pengembangan Program Non-Fisik dan Diversifikasi Ekonomi Desa

Program pembangunan non-fisik di Nagari Bomas diimplementasikan melalui pendekatan terpadu yang mencakup tiga pilar strategis: penguatan sektor pendidikan dengan pembangunan beberapa unit PAUD dan MDA, pengembangan kesehatan masyarakat melalui program pemeriksaan balita rutin untuk banyak anak, dan pemberdayaan ekonomi kreatif melibatkan sejumlah besar warga dalam berbagai program pelatihan keterampilan. Strategi ini mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia dan kelembagaan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Alana & Sari, 2023). Implementasi program pendidikan telah meningkatkan angka partisipasi PAUD secara signifikan, program kesehatan berhasil menurunkan angka stunting secara berarti dalam dua tahun terakhir, sementara program pelatihan keterampilan telah menghasilkan banyak unit usaha mikro baru dengan omzet yang cukup baik per bulan. Sinergi antara ketiga pilar ini menciptakan ekosistem pembangunan yang holistik, dimana peningkatan kualitas SDM mendorong inovasi ekonomi lokal yang pada akhirnya meningkatkan daya saing desa secara keseluruhan.

Diversifikasi ekonomi melalui program non-fisik telah menciptakan transformasi struktural dalam perekonomian Nagari Bomas dari ekonomi berbasis pertanian tradisional menuju ekonomi campuran yang lebih resilient. Transformasi ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya diversifikasi sebagai strategi mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan stabilitas pendapatan masyarakat (Syahid, 2022). Program pelatihan menjahit telah menghasilkan banyak unit usaha konfeksi dengan total omzet yang menggembirakan per tahun, pelatihan budidaya ikan menghasilkan sejumlah kolam produktif dengan hasil panen yang memuaskan per siklus, dan program literasi digital menciptakan berbagai usaha online dengan jangkauan pemasaran hingga tingkat kabupaten. Diversifikasi ekonomi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir, tetapi juga membangun resiliensi ekonomi lokal yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan guncangan eksternal,

sekaligus menciptakan basis ekonomi yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Peran BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Lokal

Pengembangan BUMNag "*Tungku Tigo Sajarang*" di Nagari Bomas merepresentasikan strategi inovatif dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa melalui diversifikasi usaha berbasis potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan. Konsep ini mengadopsi pendekatan ekonomi berbasis sumber daya (*resource-based economy*) yang memanfaatkan keunggulan komparatif desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan keterampilan masyarakat untuk menciptakan nilai tambah ekonomi (Sudarman, 2021). BUMNag telah mengembangkan lima unit usaha strategis: depot air minum "*Seribu Mata Air*" yang beroperasi dengan omzet Rp 18 juta per bulan dan melayani 850 pelanggan, unit fotokopi dengan modal awal Rp 98 juta yang dalam tahap persiapan operasional, serta unit konfeksi, peternakan, dan pertanian yang sedang dalam fase perencanaan detail dengan total proyeksi investasi Rp 350 juta. Diversifikasi portofolio usaha ini menciptakan stabilitas pendapatan dan mengurangi risiko konsentrasi pada satu sektor ekonomi, sambil mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia.

Kontribusi ekonomi BUMNag terhadap perekonomian Nagari Bomas telah menunjukkan dampak signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan membangun kapasitas kewirausahaan masyarakat. Unit usaha yang telah beroperasi menciptakan 12 lapangan kerja langsung dengan rata-rata upah Rp 2,8 juta per bulan, memberikan kontribusi PADes sebesar Rp 216 juta per tahun melalui bagi hasil keuntungan, dan memfasilitasi transfer pengetahuan kewirausahaan kepada 45 warga melalui program magang dan pelatihan (Rani, 2018). Lebih dari aspek finansial, BUMNag telah berfungsi sebagai katalis transformasi mindset masyarakat dari pekerja menjadi entrepreneur, dengan 28 alumni program BUMNag yang kemudian mendirikan usaha mandiri dengan total aset kumulatif Rp 450 juta. Peran transformatif BUMNag ini menunjukkan bahwa lembaga ekonomi desa yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus membangun resiliensi

ekonomi desa terhadap guncangan eksternal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Dana Desa

Implementasi ADD di Nagari Bomas didukung oleh tiga pilar fundamental yang menciptakan ekosistem kondusif bagi optimalisasi program pembangunan desa. Pilar pertama adalah dukungan regulasi pemerintah melalui sosialisasi komprehensif yang mencapai tingkat pemahaman yang baik di kalangan sebagian besar aparatur desa dan mayoritas masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan ADD, pilar kedua berupa partisipasi aktif masyarakat dengan tingkat kehadiran yang tinggi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan pilar ketiga adalah adaptasi teknologi dengan implementasi sistem administrasi digital yang meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan secara signifikan (Akbar, Suprpto, & Surati, 2018). Sinergi ketiga pilar ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah desa dan tidak ditemukannya temuan negatif dalam audit keuangan selama tiga tahun berturut-turut. Fondasi yang kuat ini menjadi modal dasar bagi keberlanjutan program pembangunan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Namun, optimalisasi ADD menghadapi kendala struktural yang signifikan yang memerlukan penanganan sistematis untuk penyelesaiannya. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dimana sebagian besar hanya memiliki pendidikan maksimal SMA dengan penguasaan teknologi informasi yang terbatas, proses pencairan dana yang memerlukan waktu cukup lama akibat kompleksitas birokrasi multi-level, kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal dengan tingkat akurasi pelaporan yang masih rendah, dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat hampir setengah aktivitas administrasi modern (Ghassani et al., 2022). Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai optimalisasi penuh, diperlukan investasi yang cukup besar dalam peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur teknologi, dan simplifikasi prosedur birokrasi yang dapat menghemat waktu proses secara

signifikan. Penanganan komprehensif terhadap kendala struktural ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan dampak ADD terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dan pencapaian target kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Strategi Optimalisasi

Implementasi ADD di Nagari Bomas telah menghasilkan dampak multidimensional terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur secara komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonomi mencakup peningkatan produktivitas pertanian yang signifikan, penurunan biaya produksi yang substansial melalui efisiensi infrastruktur, peningkatan pendapatan per kapita yang cukup berarti, dan terciptanya banyak lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung, yang sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang menekankan akses terhadap peluang ekonomi sebagai indikator utama kesejahteraan (Nurohman, Qurniawati & Hasyim, 2019). Dampak sosial meliputi peningkatan akses pendidikan dengan tingkat partisipasi PAUD yang meningkat drastis, perbaikan layanan kesehatan melalui program pemeriksaan balita yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, dan penguatan kohesi sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan sebagian besar rumah tangga di desa. Sementara dampak lingkungan terlihat dari implementasi praktik pertanian berkelanjutan pada sebagian besar lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang efisien dengan tingkat konservasi yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Strategi optimalisasi berkelanjutan memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan kemitraan strategis untuk memaksimalkan dampak jangka panjang ADD. Strategi ini mencakup program peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan manajerial dengan target seluruh aparatur desa memiliki sertifikasi kompetensi dalam waktu dekat, digitalisasi penuh sistem administrasi desa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan perguruan tinggi untuk transfer teknologi dan pengetahuan, serta implementasi sistem monitoring dan evaluasi

berbasis indikator kinerja digital yang real-time (Yuliana & Natalia, 2025). Proyeksi implementasi strategi optimalisasi ini diperkirakan dapat meningkatkan efektivitas program ADD secara substansial, mengurangi waktu implementasi secara signifikan, dan meningkatkan dampak kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dalam periode lima tahun kedepan. Keberhasilan strategi optimalisasi ini akan menjadikan Nagari Bomas sebagai model desa mandiri yang dapat direplikasi di wilayah lain, sekaligus membuktikan bahwa ADD yang dikelola secara profesional dan inovatif dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transformasi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa optimalisasi Alokasi Dana Desa di Nagari Bomas berhasil menciptakan transformasi ekonomi melalui pendekatan integratif yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dan program non-fisik. Temuan kunci menunjukkan evolusi strategis dari fokus infrastruktur fisik menuju pendekatan holistik yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat, dengan BUMNag "*Tungku Tigo Sajarang*" sebagai katalis diversifikasi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Keberhasilan optimalisasi didukung oleh tiga pilar fundamental: dukungan regulasi, partisipasi masyarakat tinggi, dan adaptasi teknologi, meskipun masih menghadapi kendala struktural dalam kapasitas SDM dan kompleksitas birokrasi.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan framework analisis multidimensional yang mengintegrasikan perspektif *governance*, *economic development*, dan *local institutional capacity* dalam konteks sistem pemerintahan nagari yang hibrid. Sumbangan keilmuan utama berupa evidensi empiris bahwa efektivitas Dana Desa bergantung pada kualitas proses perencanaan partisipatif, kapasitas kelembagaan lokal, dan strategi diversifikasi ekonomi berbasis potensi sumber daya desa. Penelitian ini memperkaya literatur pembangunan desa dengan membuktikan peran BUMDes sebagai katalis transformasi ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus studi kasus tunggal yang membatasi generalisabilitas temuan dan pendekatan kualitatif yang tidak mengukur magnitudo dampak ekonomi secara kuantitatif. Implikasi praktis menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring-evaluasi komprehensif dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Penelitian masa depan disarankan melakukan studi komparatif multi-kasus dan pengembangan instrumen pengukuran kuantitatif yang mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam framework evaluasi holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik*, 6(2), 135-142.
- Alana, K., & Sari, R. P. (2023). Efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera guna mendorong keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 5(2), 994-1010.
- Alana, K., & Sari, R. P. (2023). Efektivitas pelaksanaan dana desa di Pulau Sumatera guna mendorong keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 5(2), 994-1010.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The journal of positive psychology*, 12(3), 297-298.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2022). Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48-55.
- Gusti, Y., Agustar, A., & Osmet, O. (2020). Pemanfaatan dana desa dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 265-285.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Laporan pelaksanaan dana desa tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Khatimah, H. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Nugroho, D. A. (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, 7(2), 79-84.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35-43.
- Rani, S. (2018). *Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro*

Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Sudarman, S. (2021). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan UMKM Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Suwardi, A. (2011). Pengeluaran pemerintah daerah, produktivitas pertanian, dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 4.

Syahid, I. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di provinsi Papua tahun 2018-2020.

Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Yuliana, R. A., & Natalia, N. (2025). Transformasi Digital Desa Ponggok: Tantangan Dan Potensi Menuju Desa Pintar Yang Berkelanjutan. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(2), 90-97.